

Mayjen Muchdi PR dan Kol Chairawan Dibebastugaskan

Letjen TNI Prabowo Diberhentikan

Jakarta, Pelita

Setelah mengaku bersalah di depan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan melakukan pengamanan dengan menculik serta menyekap sembilan aktivis, mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto akhirnya disipilkan atau diakhiri masa dinas dari ABRI.

Sedangkan dua perwira lainnya, yakni mantan Danjen Kopassus pengganti Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Dan Grup IV/Kopassus Kol Inf Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

"Meski demikian, ketiga perwira yang dijatuhi sanksi administratif ini tidak tertutup kemungkinannya untuk diajukan ke Mahkamah Militer," kata Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, kepada wartawan, Senin (24/8) ketika membacakan keputusan hasil sidang yang digelar DKP sejak akhir Juli lalu.

Menjawab pertanyaan wartawan

mengapa Pangab tidak langsung memahmilkan Prabowo, dengan tegas Wiranto mengatakan bahwa semua mengacu kepada asas praduga tak bersalah. Semua akan terbuka saat sidang Mahmil nanti, satu persatu akan terungkap. "Jika 10 anggota diperiksa nyata-nyata membuktikan ke arah itu, tentu tiga perwira akan dimahmilkan," paparnya.

Keputusan ini, menurut Wiranto, didasarkan berbagai pertimbangan apa kesalahan yang diperbuat ketiga perwira, di samping mempertimbangkan jasa dan prestasi kerjanya. Keputusan yang diambil tanpa ada penekanan dari pihak



Letjen TNI Prabowo Subianto

lain, semata-mata demi kepentingan ABRI khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya. "Jangan spekulasi, ya," pintanya.

Seusai jumpa pers yang dihadiri pimpinan tiga Angkatan dan Polri, Wiranto kembali menegaskan bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto tidak lagi menjadi anggota ABRI, diberhentikan dengan hormat alias kembali menjadi sipil. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol Inf Chairawan tidak akan diberikan jabatan apapun dalam tugas jabatan struktural ABRI, termasuk kenaikan pangkatnya.

Menculik sembilan aktivis

Dalam kesempatan itu, Wiranto sangat berterima kasih atas perhatian masyarakat dan kalangan pers terhadap ABRI. Tetapi pihaknya juga meminta agar koreksi yang tidak konstruktif, tidak proporsional dan memiliki tujuan negatif, tidak dikembangkan karena akan